

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan bagian dari teori dalam bidang akuntansi. Menurut Jensen dan Meckling yang dikutip dalam buku karya Rapika Anwar menjelaskan teori keagenan sebagai ikatan yang terletak pada suatu kontrak dimana satu orang ataupun lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) dalam melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan sebagian kekuasaannya kepada agen yang bertugas untuk melaksanakan suatu keputusan yang terbaik untuk prinsipal. Prinsip utama teori ini adalah bentuk kerjasama antara pihak yang mengalihkan kekuasaannya (prinsipal) kepada pihak penerima kekuasaan itu (agen) dalam bentuk kontrak kerjasama yaitu *nexus of contract*.¹ Agen diartikan sebagai pihak yang diberi amanah dan kewajiban oleh prinsipal untuk melakukan pencatatan, pelaporan, serta menyampaikan hasil pekerjaan atas kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, dimana pekerjaan tersebut merupakan bentuk tanggungjawabnya.²

Konsep teori keagenan didasarkan pada suatu masalah yang timbul pada saat kepengurusan suatu kekuasaan terpisah dari kepemilikannya (prinsipal). Adanya dua pihak (agen dan prinsipal) yang menjalin hubungan dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan yang perlu dibangun untuk menyelesaikan kepentingan yang berbeda antara keduanya. Teori keagenan mengimplikasikan adanya permasalahan yang muncul antara agen dengan prinsipal. Permasalahan yang muncul pada agen dan prinsipal yaitu permasalahan terkait informasi asimetris, dimana posisi agen secara umum mengetahui lebih banyak informasi terkait posisi keuangan yang sebetulnya dan kedudukan

¹ Rapika Anwar, *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, ed. oleh Nur Lazimatul Hilma Sholehah (Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo/ Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021),

<https://books.google.co.id/books?id=GBknEAAQBAJ&pg=PR3&lpg=PR1&focus=viewport&hl=id>.

² Ni Ketut Rasmini, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan."

operasi entitas dari prinsipal. Permasalahan lainnya juga muncul ketika terdapat permasalahan terkait dengan kepentingan karena tidak sejalanannya tujuan antara kedua partisipan, dimana agen tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal, akan tetapi disisi lain agen memiliki kepentingan dalam memakmurkan dirinya sendiri.³

Konflik antara agen dan prinsipal akan menjadi lebih nyata apabila agen melaksanakan upaya yang sistematis dalam menghalangi gerak dari prinsipal, dalam posisi ini akan jauh dari prinsip transparansi data. Adanya kondisi ini secara tidak langsung akan memunculkan biaya pengamatan bagi prinsipal yang berbentuk biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi, biaya kontrak prinsipal dan agen, serta biaya lainnya. Mengingat adanya permasalahan yang terus menjadi tajam akan mengakibatkan konflik disfungsi yang berkelanjutan. Menurut Scapen dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariska Dewi Anggraeni menerangkan bahwa partisipan (agen dan prinsipal) berupaya sekeras mungkin agar dapat mengoptimalkan utilitas. Akan tetapi, utilitas mengalami hambatan yang mengakibatkan baik prinsipal tidak bisa meraih tingkat utilitas secara optimal, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut pareto optimal. Dengan tercapainya pareto optimal membuat utilitas dapat dilihat oleh berbagai pihak.

Teori keagenan juga dikenal dengan kontrak kerja, dimana fungsi kontrak kerja untuk mengendalikan proporsi utilitas partisipan dengan memperhitungkan manfaatnya secara keseluruhan. Kontrak kerja diartikan sebagai suatu perangkat aturan yang digunakan untuk mengendalikan mengenai mekanisme bagi hasil, baik berupa laba maupun risiko yang disetujui oleh partisipan. Tidak hanya itu, kontrak kerja yang maksimal merupakan suatu kontrak yang proporsional antara pihak partisipan (agen dan prinsipal) yang memperlihatkan adanya penerapan kewajiban yang maksimal oleh agen dan pemberian

³Ernie Hendrawaty, *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan* (Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Kompleks Unila Gedongmeneng Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2017), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.lppm.unila.ac.id/8068/1/Buku%2520Referensi%2520Excess%2520Cash.pdf&ved=2ahUKEwiFjq764bD4AhWa63MBHQ82BwMQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0qUVR7_heDHmS25opo04wq.

imbangan spesial oleh prinsipal untuk agen.⁴ Kontrak kerja dalam teori keagenan digunakan sebagai cara yang paling efektif dalam meminimalisir permasalahan dan dapat menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Inti teori keagenan difokuskan dalam memastikan kontrak kerja yang ideal, dimana kontrak tersebut mampu memaksimalkan utilitas tiap-tiap pihak agar tercapai tujuan secara maksimal.

Menurut Eisenhardt yang dikutip dalam buku milik Hendrawaty, teori keagenan disandarkan pada tiga asumsi, yaitu:

- a. Asumsi terkait Sifat Manusia
Asumsi ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai sifat egois, keterbatasannya rasionalitas yang dimiliki, serta tidak menyukai risiko.
- b. Asumsi terkait Organisasi
Adanya persaingan antar anggota organisasi, efisiensi dijadikan sebagai kriteria produktivitas, serta terdapat informasi asimetris oleh agen dan prinsipal.
- c. Asumsi terkait Informasi
Asumsi ini menerangkan bahwa informasi yang ada dianggap sebagai produk komoditi yang dapat dijual.⁵

Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah teori terkait hubungan agen dan prinsipal, dimana agen ini sebagai pengelola dan prinsipal sebagai pemilik. Adanya hubungan antara agen dan prinsipal dapat memunculkan masalah, maka dibuatlah kontrak kerja yang dapat meminimalisir konflik tersebut. Selain itu, pihak prinsipal mengantisipasi konflik dengan menciptakan sistem informasi akuntansi, memantau atau memonitoring agen dengan menggunakan sistem yang canggih, sisa kerugian, dan lainnya.

Teori keagenan menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan adanya hubungan antara dua pihak (agen dan prinsipal). Teori keagenan relevan digunakan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan teori keagenan kompetensi sumber daya manusia terdapat hubungan dengan agen, dimana posisi selaku agen adalah pihak

⁴ Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory Dalam Perspektif Islam," *JHI: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011), <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

⁵ Hendrawaty, *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan*.

yang membuat atau mengelola laporan keuangan yang seharusnya mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan, seperti menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi, memahami peran dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan, serta jika perlu sudah mempunyai pengalaman di bidang akuntansi supaya dapat memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat dilihat pada variabel penerapan sistem pengendalian intern, dimana pemerintah selaku agen memiliki tanggungjawab atas kinerja dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial adalah melakukan penerapan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang baik mempunyai pengaruh atas pencapaian kinerja pemerintah. Adanya sistem pengendalian intern, keseluruhan proses pengujian, peninjauan, evaluasi, pemantauan, serta aktivitas pengawasan dari organisasi akan memberikan jaminan yang wajar bahwa aktivitas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, adanya peningkatan sistem pengendalian intern yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah.

2. Teori Kegunaan Keputusan (*Decision- Usefulness Theory*)

Teori kegunaan keputusan yang menentukan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teori kegunaan keputusan dikemukakan awal kali pada tahun 1954 di *University of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus. Pertama kali teori ini disebut dengan *A Theory of to Investors*.⁶ Menurut Scott yang dikutip dalam artikel Agus Indra Tenaya menjelaskan bahwa teori kegunaan keputusan adalah suatu teori dalam bentuk pendekatan pada laporan keuangan yang akan berguna jika difokuskan pada biaya historis, dimana teori ini akan dihadapkan pada dua konflik yaitu awal siapa pengguna dan apa permasalahan keputusan pengguna pelaporan keuangan.⁷

⁶ Farah Nur Fauziah , Cafriana Christin Bakker, Daymilian, dan Yunibere, "Decision Usefulness Approach To Financial Reporting," n.d.

⁷ Agus Indra Tenaya, "Decision Usefulness : Trade-off Antara Reliability Dan Relevance," n.d., 1–20.

Chambers merupakan orang pertama yang menggunakan model paradigma kegunaan keputusan. Pendekatan model keputusan bertujuan untuk menentukan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Teori kegunaan keputusan ini mencakup persyaratan mengenai kualitas informasi akuntansi yang bermanfaat untuk keputusan yang hendak dibuat oleh pengguna informasi akuntansi. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi meliputi faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penyaji informasi akuntansi agar relevansi yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakan informasi tersebut.

Premis dari teori kegunaan keputusan merupakan tujuan akuntansi yang digunakan menyediakan data keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi berhubungan dengan para pemangku kepentingan, dimana akuntansi berfungsi menyediakan data keuangan organisasi dalam mengambil keputusan. Perilaku manajemen terhadap pelaksanaan standar akuntansi berhubungan dengan berartinya pengungkapan data akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam wujud laporan keuangan.⁸ Teori kegunaan keputusan tercermin dalam wujud kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh komponen laporan keuangan supaya bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.⁹

Kandungan teori kegunaan keputusan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Kandungan Kualitas Primer

Kandungan ini berisi komponen-komponen dari nilai relevan, yaitu tepat waktu, nilai umpan balik, dan nilai prediktif.

b. Kandungan Reliabilitas

Kandungan reliabilitas berisi komponen-komponen yang sebenarnya, netralitas, serta dapat diperiksa.

⁸ Lestari dan Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."

⁹ I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan."

c. Kandungan Sekunder

Kandungan ini berisi komponen-komponen komparabilitas dan taat asas.¹⁰

Dengan mengetahui komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan, penyaji informasi akuntansi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang digunakan menyajikan informasi akuntansi, karena teori kegunaan keputusan mengandung tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna informasi akuntansi. Pengambilan keputusan yang belum memahami syarat maupun komponen dalam pengambilan keputusan untuk menyajikan suatu informasi akuntansi akan ada rasa ragu-ragu dan khawatir yang mendalam, karena keputusannya menyangkut banyak orang. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا
يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya: Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhuma, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata. “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu” (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).¹¹

¹⁰ Hardyansyah, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2016).

¹¹ Moh. Syamsul Falah, “Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Islam,” *Menara Tebuireng* 12, no. 2 (2017): 134–48.

Hadits diatas memberi pemahaman bahwa sebagai pengambil keputusan dituntut meninggalkan sesuatu yang dapat membuat ragu dan mengambil yang sudah membuatnya yakin saja. Karena keraguan sudah pasti akan berdampak pada hasil keputusan yang telah ditetapkan. Keraguan ini akan membuat kita tidak tenang, menimbulkan kegalauan, serta dapat merusak mental.

Teori kegunaan keputusan (*Decision- Usefulness Theory*) menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena teori ini mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi supaya cakupan yang ada mampu memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan memakainya. Teori ini relevan digunakan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi. Teori kegunaan keputusan berhubungan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi, karena dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang baik maka diperlukan pemanfaatan teknologi yang memadai. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat mencapai kandungan kualitas primer dari teori kegunaan keputusan, maka laporan keuangan yang disajikan akan berkualitas.

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan sistem terdepan dalam merespon aspirasi rakyat daerah, suportif terhadap kebijakan nasional, dan tanggap terhadap kecenderungan global, sehingga kebijakan desentralisasi serta otonomi daerah diharapkan sanggup merespon tuntutan pelayanan publik yang efisien, efektif, serta bisa merespon secara kilat berbagai masalah administrasi pemerintahan.¹² Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah ialah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

¹² Gusnar Ismail, “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi covid-19,” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (n.d.): 426–41.

Indonesia”.¹³ Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara maksimal, jika pelaksanaan urusannya disertai dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk daerah. Sumber keuangan daerah berasal dari hasil sumber keuangan dari urusan yang dilakukan pemerintah, dimana sumber keuangan tersebut sudah diserahkan kepada daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala daerah karena kepala daerah memiliki kedudukan terpenting dalam struktur pemerintahan daerah, dimana kepala daerah diberi kekuasaan pemegang dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan wewenangnya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh wewenang keuangan daerah kepada perangkat daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan ini berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain (PAD) yang sah.

b. Dana Perimbangan

Sumber pendapatan ini berasal dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus.

c. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.¹⁴

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur tentang situasi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh substansi pelaporan.¹⁵ Laporan keuangan berisi informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan semua transaksi selama satu

¹³ Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik,” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36.

¹⁴ Anwar, *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

¹⁵ Sandrayati, Faridah, dan Kgs. Zainal Arifin, “Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 19–26.

tahun anggaran.¹⁶ Tujuan umum dari laporan keuangan di pemerintah daerah yaitu untuk menyajikan informasi terkait laporan keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja entitas dalam proses laporan yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengevaluasi tentang alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dari kumpulan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas sebagai eksekutif dalam melakukan pengelolaan keuangan di pemerintahan supaya berjalan secara maksimal, sehingga setiap OPD diharuskan melakukan penyusunan laporan keuangan.¹⁷ Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.¹⁸ Komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah terbagi menjadi tujuh, yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta catatan atas laporan keuangan.¹⁹

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat baik buruknya laporan keuangan dalam satu tahun anggaran. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa dilihat dari hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Setiap tahun laporan keuangan pemerintah daerah akan dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apabila BPK melakukan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD bisa diartikan laporan

¹⁶ Ferri Saputra T, Sri Rahayu, dan Yudi, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi* 5, no. 4 (2020): 268–79.

¹⁷ Nurul Rizka Arumsari, “Determinan Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.”

¹⁸ Khairudin dan Rina Erlanda, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 2 (2016): 137–54.

¹⁹ Nova Rosmalita dan Nadirsyah, “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh,” *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 239–48, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>.

keuangan suatu entitas disajikan dan dapat dikatakan wajar dan berkualitas. Opini yang diberikan oleh BPK ada empat jenis, yaitu opini WTP, opini WDP, opini TMP, serta opini TW.²⁰

Laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas, jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan karakteristik kualitatif ini dijadikan sebagai indikator penelitian ini dalam mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Relevan, yaitu informasi yang terkandung dalam LKPD sebagai dasar pengambilan keputusan, dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi pada masa lalu.
- b. Andal, yaitu informasi yang disajikan dalam LKPD tidak menyesatkan, kesalahan material, menyajikan setiap fakta (jujur), sesuai kondisi sebenarnya, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat Dibandingkan, yaitu informasi yang tercantum dalam LKPD bermanfaat jika dilakukan perbandingan dengan LKPD periode sebelumnya.
- d. Mudah Dipahami, informasi yang tersaji dalam LKPD dengan mudah dipahami oleh para pengguna informasi sebagai pengetahuan terkait informasi yang memadai.²¹

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Boyatzis dikutip dalam artikel yang dilakukan Ria Mustikah Drina, Susi Sulandari, dan Rihandoyo mendefinisikan kompetensi merupakan kapasitas yang terdapat pada individu yang mampu membuat individu itu bisaenuhi persyaratan pekerjaan pada organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat meraih hasil

²⁰ Elvin Andrianto, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komite Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Per” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

²¹ Ermita Veliani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi),” *Juhanperak*, n.d., 74–95.

sesuai yang diharapkan.²² Seseorang yang mempunyai kompetensi akan bekerja sesuai pengetahuan dan keahliannya, sehingga dapat mempermudah pekerjaannya, bekerja dengan cepat dan tepat, serta dengan pengalaman yang dimiliki dapat mengurangi kesalahan.²³ Adapun definisi kompetensi sumber daya manusia merupakan individu yang mempunyai kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melakukan pekerjaan secara profesional, efisien, serta efektif untuk meraih tujuan suatu organisasi.²⁴

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung terselenggaranya laporan keuangan di Pemerintah, supaya penyajian dan penyusunan laporan keuangan lebih transparan, meminimalisir kesalahan pada saat mencatat dan menghitung, serta dapat menyajikan dan menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu.²⁵ Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi akan melakukan pekerjaan secara maksimal agar tujuan pemerintah daerah mencapai targetnya dan berjalan secara baik.²⁶ Dalam mengelola dan menyusun LKPD yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten, dengan didukung oleh latar belakang pendidikan (akuntansi), berpengalaman pada

²² Ria Mustikah Drina, Susi Sulandari, dan Rihandoyo, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang,” n.d.

²³ Delvina Yulanda dan Rosananda Oktala, “Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Seksi Keuangan POLRES,” *JOMB: Journal of Management and Bussines* 3, no. 1 (2021): 1–9.

²⁴ Fauzi Isnaen dan Fauzan Akbar Albastiah, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat),” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2021): 55–73, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal>.

²⁵ Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY,” *Jurnal Nominal* 6, no. 2 (2017): 14–28, <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>.

²⁶ I Gusti Ayu Krisna Dewi dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi Profesi* / 11, no. 1 (2020): 137–47.

bidang keuangan, serta selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dukungan tersebut sangat diperlukan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi yang digunakan.²⁷

Menurut Hutapea dan Thoah yang dikutip dalam penelitian Rosananda Oktala, indikator kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

- a. Pengetahuan, yaitu memahami dan mengetahui pengetahuan sesuai dengan bidangnya yang menyangkut tugas dan tanggungjawab bekerja.
- b. Keterampilan, yaitu berhubungan dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas baik.
- c. Sikap, yaitu kreativitas saat bekerja dan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam organisasi.²⁸

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. Pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi berbasis komputer yang diperlukan oleh seseorang dalam suatu instansi atau organisasi untuk mengolah data dan informasi secara efisien dan efektif yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.²⁹

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan informasi keuangan karena teknologi informasi mempunyai penyimpanan data yang besar dan memiliki tingkat keakuratan yang sangat kuat. Pekerjaan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi membutuhkan biaya yang besar. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga akan membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan,

²⁷ Istiqomah Shinta Philadelphina, Sri Suryaningsumi, dan Sriyono, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research* 2, no. 1 (2020): 17–35.

²⁸ Rosananda Oktala, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Seksi Keuangan POLRES."

²⁹ Fauzan Akbar Albastiah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat)."

dan dapat meminimalisir kesalahan mulai dari dokumen buku, jurnal, serta buku besar sampai menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik sangat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi.³⁰ Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan menyebarluaskan informasi keuangan untuk pelayanan publik.³¹ Untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah melakukan pekerjaan secara terpadu melalui penyederhanaan akses antar unit kerja.³² Adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah dapat meningkatkan kualitas LKPD, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik kualitas LKPD.

Menurut Indriasari dan Nahartyo yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang indikator pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi, yaitu:

- a. Perangkat Keras Komputer (*hardware*), yaitu perangkat keras yang meliputi komponen mulai dari masukan sampai keluaran.

³⁰ Khoirina Kencana Ningrum, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2018).

³¹ Sri Rahayu dan Misni Erwati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.”

³² Rama Ardianto dan Chermian Eforis, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (S,” *Jurnal Bina Akuntansi* 6, no. 1 (2019): 95–136, <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>.

- b. Perangkat Lunak Komputer (Software), yaitu sistem perangkat lunak yang meliputi sistem operasi, utilitas serta aplikasi.
- c. Jaringan dan Komunikasi, yaitu sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu unit yang dapat dioperasikan.
- d. *Database*, yaitu wadah atau file yang berisi program dan data yang dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.
- e. Personalia Teknologi Informasi, yaitu pihak yang terlibat dalam sistem informasi.³³

7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan perencanaan yang didalamnya terdiri dari struktur organisasi, metode-metode, serta perlengkapan yang digunakan untuk mengkoordinasikan suatu instansi yang bertujuan dalam menjaga keamanan harta milik suatu entitas, bermanfaat dalam ketelitian dan keakuratan data akuntansi, sehingga dapat mendorong efisiensi dan dapat mendorong mematuhi peraturan manajemen yang berlaku.³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan tentang sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang integral dalam suatu kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berkala oleh manajemen dan semua pegawai dalam memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi seperti keandalan laporan keuangan dan taat peraturan yang berlaku.³⁵

Upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam proses laporan keuangan sangat penting dalam menerapkan sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern di pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan ini berlaku untuk semua pegawai yang bekerja

³³ Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang, “Pengaruh Kapasitas SDM, Komite Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal MANEKSI* 7, no. 2 (2018): 100–109.

³⁴ Chara Pratami T. Tubarad, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.”

³⁵ Faridah dan Kgs. Zainal Arifin, “Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan.”

dalam suatu instansi tersebut.³⁶ Penerapan sistem pengendalian yang baik akan mempengaruhi tercapainya tujuan kinerja manajerial pemerintahan. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan membantu mempermudah dalam melaksanakan peninjauan, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan pada instansi pemerintah.

Indikator penerapan sistem pengendalian intern terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian, yaitu menjelaskan terkait ciri khas organisasi dan mempengaruhi rasa kontrol karyawan.
- b. Penilaian Resiko, yaitu identifikasi dan analisis entitas atas resiko yang terkait dengan pencapaian tujuannya dan merupakan dasar untuk menentukan bagaimana resiko yang akan dikelola.
- c. Aktivitas Pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan pelaksanaan arahan manajemen.
- d. Informasi dan Komunikasi, yaitu mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan tanggungjawabnya.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern, yaitu proses yang menentukan kualitas penerapan pengendalian intern dari waktu ke waktu.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dukungan atas teori-teori yang sudah ada, maka dianggap perlu untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan pada penelitian yang sedang diujikan. Sebab bagaimanapun juga, hasil penelitian terdahulu merupakan sebuah konsep yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah, dan juga merupakan bagian dari sebuah teori. Sebagai referensi penulis dan pendukung dalam melaksanakan penelitian, berikut ini terdapat

³⁶ Chermian Eforis, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)”

³⁷ Hadi Jauhari, Suhairi Hazisma, dan Evada Dewata, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah,” *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 104–21, <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2569>.

beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Analisis	Teori yang digunakan
1	Yulia Syafitri dan Delori Nancy Meyla (2021) ³⁸	“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang”	Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Keagenan
2	Tapi Rumondang Sari Siregar (2021) ³⁹	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Keagenan

³⁸ Yulia Syafitri dan Delori Nancy Meyla, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang.”

³⁹ Tapi Rumondang Sari Siregar, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu.”

		Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu”	dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan		
3	Sri Rahayu dan Misni Erwati (2020) ⁴⁰	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh, sedangkan Sumber Daya Manusia berpengaruh	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Keagenan

⁴⁰ Sri Rahayu dan Misni Erwati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.”

		Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo”	terhadap Kualitas Laporan Keuangan		
4	Lestari dan Dewi (2020) ⁴¹	“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Badung”	Pemahaman akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Kegunaan-Keputusan
5	I Gusti Ayu Nyoman Budiasih	“Pengaruh <i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan di OPD Kota Denpasar”	<i>Good Governance</i> , Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan searah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Keagenan, Teori Regulasi, dan Teori Kepatuhan

⁴¹ Lestari dan Dewi, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”

	(2019) ⁴²				
6	I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka (2018) ⁴³	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan”	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Kegunaan Keputusan Informasi

⁴² I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, “Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan.”

⁴³ I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.”

7	Maryono dan Batara Daniel Bagana (2017) ⁴⁴	“Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang”	Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Teori Keagenan
---	---	--	--	----------------------------------	----------------

Sumber: Berbagai Literature

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, peneliti fokus penelitian pada kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian-penelitian yang ada, peneliti bermaksud menguji pada objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dirangkum, yang menjadi persamaan dan perbedaan antara

⁴⁴ Maryono dan Batara Daniel Bagana, “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.”

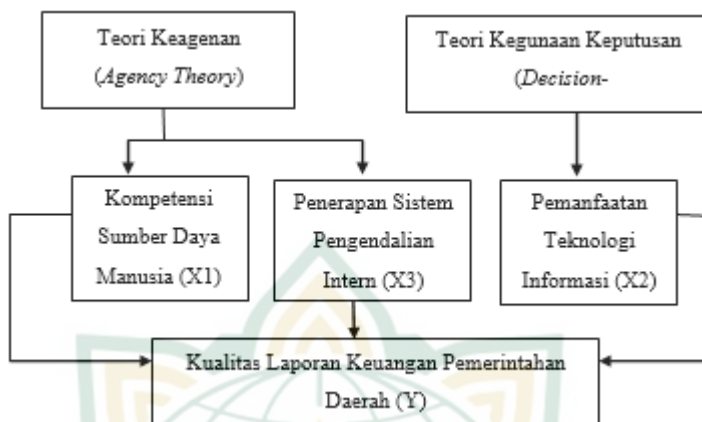
penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah pada persamaan keduanya menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD, serta metode yang dipergunakan sama yaitu analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, tahun penelitian, perbedaan variabel *independent* yang digunakan, serta *grand theory* yang digunakan dalam penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan terkait ikatan agen sebagai pengelola dan prinsipal sebagai pemilik, dimana ikatan tersebut akan memunculkan konflik antara partisipan (agen dan prinsipal) akibat dari kepengurusan yang dilimpahkan kepada agen terpisah dari pemiliknya. Adanya konflik yang muncul ini dibuatlah kontrak kerja, sehingga dapat meminimalisir dan menyelesaikan konflik tersebut. Untuk mengantisipasi konflik prinsipal akan melakukan berbagai cara agar konflik tidak akan berkepanjangan, seperti menciptakan sistem informasi akuntansi, menggunakan sistem yang modern dan canggih untuk memantau segala aktivitas agen, dan lainnya. Oleh karena itu, teori keagenan relevan digunakan pada variabel kompetensi sumber dan penerapan sistem pengendalian intern, dimana dalam variabel tersebut terdapat ikatan agen dengan prinsipal yang dapat meningkatkan kinerja manajerial seperti menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian, dengan adanya teori kegunaan keputusan penyaji informasi akuntansi akan mempertimbangkan komponen-komponen untuk memenuhi kebutuhan pengambil keputusan yang menggunakan sistem akuntansi tersebut. Teori kegunaan keputusan relevan digunakan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai kandungan primer dari teori ini, sehingga laporan keuangan yang disajikan akan berkualitas.

Oleh karena itu, dalam memperjelas terkait arah dan tujuan penelitian secara utuh diperlukan uraian terkait skema kerangka berfikir dalam penelitian ini, sehingga dapat menguraikan suatu gambaran terkait permasalahan tersebut. Berikut skema terkait kerangka berfikir:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Hasil Analisis, 2022

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya dilakukan pengujian secara empiris. Hipotesis sangat bermanfaat dalam penelitian, karena tanpa hipotesis tidak ada perkembangan wawasan atau definisi ilmiah saat mengumpulkan fakta empiris. Cara pengujian hipotesis tergantung pada metode yang digunakan dan rancangan penelitian. Dalam hal ini yang terpenting yaitu hipotesis harus diuji dan hipotesis dicari kesamaanya dengan fakta maupun logika.⁴⁵

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia berperan penting dalam suatu organisasi atau instansi. Sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam suatu organisasi, di pemerintahan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena jika

⁴⁵ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP), 2009), <https://books.google.co.id/books?id=ltq0DwAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PP1&foc us=viewport&hl=id>.

pegawai tidak memiliki hal tersebut akan menemui hambatan dalam pekerjaan yang dilakukannya.⁴⁶

Berdasarkan penelitian I Gusti Ayu Nyoman Budiasih menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan searah pada kualitas laporan keuangan.⁴⁷ Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dan Misni Erwati menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh.⁴⁸ Sedangkan penelitian Maryono dan Batara Daniel Bagana menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan.⁴⁹ Penelitian yang dilakukan Yulia Syafitri dan Delori Nancy Meyla juga menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁵⁰ Begitupula penelitian Tapi Rumondang Sari Siregar menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.⁵¹ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴⁶ Khotimatus Sa'adah, Riana Sitawati, dan Subchan, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi," *JIMAT: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 8, no. 2 (2017): 64–79.

⁴⁷ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan."

⁴⁸ Sri Rahayu dan Misni Erwati, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo."

⁴⁹ Maryono dan Batara Daniel Bagana, "Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang."

⁵⁰ Yulia Syafitri dan Delori Nancy Meyla, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang."

⁵¹ Tapi Rumondang Sari Siregar, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu."

H₁ : Diduga variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus

2. Pengaruh Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Frestilia yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan Nuraini Ismail, Apriana Marselina, dan Elsensiana Bupu Loda menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu hal yang universal dalam bidang akuntansi, dimana perkembangan pemanfaatan teknologi informasi banyak berjasa dalam meningkatkan sistem akuntansi pada instansi atau organisasi.⁵² Adanya teknologi informasi yang semakin modern akan mempermudah segala aktivitas yang dilakukan penggunaannya. Teknologi informasi sangat bermanfaat dalam proses penyajian dan penyusunan laporan keuangan dari manual, sekarang menjadi otomatis, maka laporan keuangan yang disusun dan disajikan menggunakan teknologi informasi akan berkualitas.

Berdasarkan penelitian I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁵³ Sedangkan penelitian Sri Rahayu dan Misni Erwati pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas keuangan.⁵⁴ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

⁵² Nuraini Ismail, Apriana Marselina, dan Elsensiana Bupu Loda, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo" 15, no. 12 (2021): 5889–96, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>.

⁵³ I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan."

⁵⁴ Sri Rahayu dan Misni Erwati, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo."

3. Pengaruh Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Yudi mendefinisikan bahwa sistem pengendalian intern merupakan sesuatu proses yang direalisasikan pimpinan daerah atau instansi digunakan dalam memberikan keyakinan yang mencukupi terkait perolehan tiga golongan, yaitu keandalan laporan keuangan, taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku, serta keefektifitas dan keefisien operasi.⁵⁵ Sistem pengendalian intern berguna untuk mencegah adanya pemborosan dan ketidakefisien, alat pencegah hilangnya aset, serta mendorong taat dalam mengelola laporan keuangan. Sistem pengendalian yang diterapkan secara efektif, efisien, dan mengacu pada program yang direncanakan, maka akan mendorong dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.⁵⁶

Berdasarkan penelitian Lestari dan Dewi menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁵⁷ Penelitian yang dilakukan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih menunjukkan hasil bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan searah terhadap kualitas laporan keuangan.⁵⁸ Penelitian yang dilakukan I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka juga menunjukkan hasil variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan.⁵⁹ Peneliti yang dilakukan Maryono

⁵⁵ Sri Rahayu dan Yudi, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat."

⁵⁶ Evada Dewata, Hadi Jauhari, dan Misfi El Auda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 44–53.

⁵⁷ Lestari dan Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."

⁵⁸ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan."

⁵⁹ I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan."

dan Batara Daniel Bagana menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.⁶⁰ Sedangkan penelitian Tapi Rumondang Sari Siregar menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.⁶¹ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diduga Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus



⁶⁰ Maryono dan Batara Daniel Bagana, “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.”

⁶¹ Tapi Rumondang Sari Siregar, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu.”